

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI
DESA TAMAN KECAMATAN SUMBERMALANG
KABUPATEN SITUBONDO MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UU NO.06 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Skripsi

Oleh:

Ella Eka Ratnasari

NIM. C05215009



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ella Eka Ratnasari

NIM : C05215009

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata
Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa
Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten
Situbondo Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 November 2019

Saya yang menyatakan,



Ella Eka Ratnasari
NIM. C05215009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ella Eka Ratnasari NIM.C05215009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Desember 2019

Pembimbing



Drs. Jeje Abd Rojaq, M.Ag

NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Ella Eka Ratnasari NIM. C95215009 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 16 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Penguji I,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag

NIP.196310151991031003

Penguji II,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI

NIP. 197809202009111009

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI

NIP. 198911362201603310

Surabaya, 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ella Eka Ratnasari
NIM : C05215009
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : Ahmadsanusi576@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

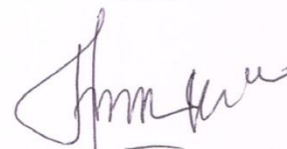
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2020

Penulis



(Ella Eka Ratnasari)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.” untuk menjawab permasalahan tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, Pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah *kedua* yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, sudah melakukan upaya untuk mematuhi aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan Undang-undang tentang desa, dikarenakan kurangnya koordinasi secara parsitipatif. Hal itulah yang memancing keresahan terhadap pihak Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam konteks Hukum Islam yaitu *Al-sulṭah al-tanfidhīyah*, Tugas dan Fungsi kepala desa masuk pada *Imam/Khalifah* yang memiliki hak dan kewajiban sebagai kepala pemerintahan agar bersifat adil.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap kepada Kepala Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo agar dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan semua warga masyarakat. Harapannya supaya terjalin hubungan baik antara pemimpin dan warganya serta menciptakan desa yang sejahtera.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TEORI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM.....	23
A. <i>Siyāṣah Dustūrīyah</i>	24
1. <i>Siyāṣah dawliyah</i>	27
2. <i>Siyāṣah Mālīyah</i>	29
B. Pengertian Imam (Khalifah)	31
C. Hak dan Kewajiban Imam.....	33
D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	37

BAB III	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI DESA TAMAN KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO	43
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
	B. Penyelenggara Pemerintahan Desa	48
	C. Fungsi Kepala Desa.....	51
	D. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo	54
BAB IV	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI DESA TAMAN KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	62
	A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermlang Kabupaten Situbondo	62
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo	65
BAB V	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah tempat dimana sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal. Dalam suatu wilayah yang disebut desa ada seorang pemimpin yaitu Kepala Desa. Sesuai dengan regulasi yang ada bahwasannya Kepala Desa ialah komponen terpenting dan berkedudukan tertinggi dalam wilayah tersebut yang memegang penuh kendali desa.

Kesejahteraan dan keharmonisan desa dapat tercipta dari kerja sama yang baik antara pemerintah wilayah dengan masyarakat. Baik berupa gotong royong, sosialisasi, dan transparansi. Sehubungan agar terciptanya cita-cita masyarakat desa untuk menjadikan desa sebagai desa yang produktif dalam tanda kutip bukan hanya pada perihal pembangunan saja melainkan pada kesejahteraan masyarakat desa pula, maka sangat diperlukan penerapan dilapangan yang sesuai dengan regulasi baik dari hukum islam maupun hukum positif agar tercipta suatu desa yang produktif. Problematika yang ada dilapangan khususnya pada kondisi desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo mengakibatkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Baik berupa teoritis maupun praktis

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan

Pembangunan di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo perlu mendapatkan perhatian khusus terutama jalur akses masyarakat yang bertempat tinggal di lereng-lereng. Tidak meratanya pembangunan rabat jalan membuat warga Desa kesulitan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari yang mana membutuhkan akses yang baik untuk dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Mengingat cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan keselamatan terancam.

Tujuan pembangunan tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah termasuk di tingkat Desa. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan desa harus dimaksimalkan oleh Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

Kepala Desa seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Setelah penulis mengamati kinerja Kepala Desa selama 1 periode, dan hampir berakhir masa periode di bulan september 2019 ini, penulis memiliki banyak kejanggalan atas problematika kepemimpinan Kepala Desa Taman. Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) bahwasannya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Kepala Desa diharuskan menyelenggarakan pemerintahan desa meliputi yang disebut pada pasal (2). Dalam acuan tersebut Kepala Desa tidak maksimal dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Pada masa kepemimpinan

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1).

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara yang kedudukannya paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekertaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.⁴

Dalam hal melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa tidak terjun langsung memberikan instruksi dan pengarahan sehingga pembangunan dapat sesuai dengan harapan. Kurangnya sosialisasi baik Kepala Desa maupun perangkat Desa yang ada membuat masyarakat cenderung acuh tak acuh dalam hal gotong royong. Pada kejadian longsor di jalan tanjak yang

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan

Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Untuk menciptakan Desa yang kondusif maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab.

Penulis memilih Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo sebagai objek penelitian ialah karena perbedaan yang sangat signifikan dengan Desa terpencil lain yang berdekatan. Serta kondisi Desa terpencil yang kurang mendapatkan perhatian khusus juga menjadi faktor utama yang mendorong antusias penulis dalam penelitian ini. Karena pemberdayaan masyarakat Desa sangat penting untuk kemajuan masyarakat Desa tersebut.

Kepala Desa sebagai pemimpin Desa harus dapat menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik. Berdasarkan Ijma' ulama bahwa yang diangkat menjadi seorang imam ialah orang yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan tugas *Imāmah*. Istilah dalam Al-Qur'an antara lain Seperti yang disebut dalam Firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada

Tugas-tugas Imam (Khalifah) secara umum ada sepuluh yang diantaranya sangat sesuai dengan problematika yang ada di Desa Taman yaitu berusaha turun langsung kelapangan guna menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin

7. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelaksanaan memberi pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya ialah dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat itu terdiri dari membangun jalan, irigasi, pintu air, dam, lampu penerangan, sumur artesis, pos jaga serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK SD dan lain-lain.⁹

peraturan Undang-Undang Desa. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT kelak. Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tamanyang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Diharapkan setidaknya ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian lisa oktavia, tinjauan *fiqh siyāṣah* dan undang-undang Desa terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa V ulu Kecamatan karya penggawa Kabupaten pesisir barat. Penelitian ini membahas tentang peran masyarakat Desa V ulu Kecamatan Karya penggawa Kabupaten pesisir barat yang enggan ikut serta dalam berpartisipasi dalam pembanguan Desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Desa *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa, antara lain membahas: *Pertama*, membahas pengelolaan wilayah tingkat Desa. *Kedua*, membahas tugas dan wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan Pembangunan. *Ketiga*, pendapat masyarakat tentang Kepala Desa atau ketua pekon yang beragam. Dalam skripsi ini penulis hanya memaparkan tidak ikut sertanya masyarakat dalam berpartisipasi dikarenakan kurang maksimalnya pembangunan Desa terutama beton

1. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹³ Fungsi Kepala Desa ialah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga.¹⁴ Kepala Desa ialah jabatan tertinggi diantara tatanan struktur desa, dan jabatan terendah atau paling bawah diantara struktur pemerintahan pusat. Peran Kepala Desa adalah peran Kepala Pemerintahan Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugasnya sesuai menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas untuk menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁵

¹⁴Pernendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa, (Www.Berdesa.Com/Tugas-Dan-Fungsi-Kepala-Desa-Ini-Dia/) Di Upload Tgl 29 Desember 2017, Diakses 15 Maret 2019

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo ialah salah satu kunci utama dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu desa membangun.

Dalam hal desa membangun ini ialah desa memiliki kewenangan untuk mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Desa membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, oleh desa, dari desa, untuk desa.¹⁶

pendapat ulama, buku-buku *hqn*, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan objek penulisan yang akan diteliti.

Contohnya:

- 1) Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- 2) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- 3) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, (Makassar: Al-Insani, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

- pendapat ulama, buku-buku *hqn*, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan objek penulisan yang akan diteliti.
- Contohnya:
- 1) Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
 - 2) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
 - 3) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, (Makassar: Al-Insani, 2007).
3. Teknik Pengumpulan Data

pendapat ulama, buku-buku *hqn*, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan objek penulisan yang akan diteliti.

Contohnya:

- 1) Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- 2) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- 3) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, (Makassar: Al-Insani, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

pendapat ulama, buku-buku *hqn*, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan objek penulisan yang akan diteliti.

Contohnya:

- 1) Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- 2) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- 3) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, (Makassar: Al-Insani, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

pendapat ulama, buku-buku *hqn*, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan objek penulisan yang akan diteliti.

Contohnya:

- 1) Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- 2) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- 3) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, (Makassar: Al-Insani, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

pendapat ulama, buku-buku *hqn*, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan objek penulisan yang akan diteliti.

Contohnya:

- 1) Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- 2) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- 3) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, (Makassar: Al-Insani, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

pendapat ulama, buku-buku *hqn*, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan objek penulisan yang akan diteliti.

Contohnya:

- 1) Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- 2) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- 3) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, (Madinah: Darul Insani, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus atau tulisan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian lapangan. Cara ini digunakan guna

memperoleh data dari sumber baik dari buku-buku maupun yang lain yang dengan berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.²¹

Bab keempat, ialah berisi tentang analisis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan saran dan penutup yang meliputi pembahasan pada penulis.

BAB II

A. *Siyāṣah Dustūrīyah*

Secara bahasa *siyāsah dustūrīyah* terdiri dari dua kata, *al-siyāsah* dan *al-dustūrīyah*. Makna *al-siyāsah* telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sedangkan *al-dustūrīyah* secara etimologis berasal dari bahasa Persia yang bermakna sebuah catatan yang berisi nama-nama tentara, catatan yang berisi undang-undang penguasa. Kata ini kemudian diadopsi kedalam bahasa Arab yang menunjukkan pengertian undang-undang.²³ Sedangkan secara terminologis, *siyāsah dustūrīyah* adalah kumpulan hukum-hukum yang mengatur tentang bentuk dan konstitusi negara, kekuasaannya, cara pemindahan kekuasaan, dan mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara dalam batas administrasi suatu negara.²⁴ Hubungan ini juga menyangkut hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan dalam suatu negara.

Ruang lingkup pembahasan dalam *siyāsah dustūrīyah* dibatasi hanya dalam wilayah pembahasan mengenai penyesuaian prinsip-prinsip agama dalam aturan perundang-undangan yang menekankan pada aspek *maṣlahah al-mursalah* serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam suatu negara.²⁵

Untuk dapat menerapkan prinsip tersebut, *fiqh dustūrīyah* mendasarkan

²³ Taufiq bin Abd al-‘Azīz al-Sadīrī, *al-Islām wa al-Dustūr* (Riyad: Wikalah al-Matbū’ah wa al-Baḥth al-Ilmī, 1425 H.), 33.

²⁴ Ibid.

²⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 47.

Kedua, sultāh qaḍāʾīyah (kekuasaan yudikatif) yakni lembaga yang menjalankan kekuasaan dalam wilayah kehakiman. Dalam struktur negara

²⁷Khalāf, *al-Siyāsah al-Shar'ah...*, 41.

Berbeda dengan Abd al-Wahāb Khalāf, Abd al-Qādir Awdah membagi kekuasaan dalam negara menjadi lima. *Pertama, al-sulṭah al-tanfīdhīyah* yakni lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang yang didalamnya terdiri dari pemimpin negara. *Kedua, al-sulṭah al-tashrīʿīyah* yakni lembaga yang mengatur dan membuat perundang-undangan. *Ketiga, al-sulṭah al-qadāʿīyah* yakni lembaga yang bertugas mengakkan keadilan di masyarakat dan memutuskan perselisihan dan pertentangan yang muncul. *Keempat, al-sulṭah al-māliyah* yakni lembaga yang menangani keuangan termasuk di dalamnya permasalahan zakat dan

³⁰ Ali bin Muhammad al-Baṣrī al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* (Mesir: Mustafā al-Babī al-Halabī. t.th), 3.

distribuasinya. *Kelima, sulṭah al-muraqabah wa al-taqwīm* yakni lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakkan hukum.³¹

a. *Siyāṣah Dawliyah*

Siyāsah dawliyah adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun pemerintahan.³² Dalam pelaksanaannya, *siyāsah dawliyah* dibatasi oleh satu asas damai yang telah disepakati bersama. Asas damai ini mengklaim bahwa perang hanya diperbolehkan jika ada sebab, yakni adanya kedholiman, menghilangkan fitnah dan mempertahankan diri dari serangan. Oleh sebab itu, perang hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam sebuah perjanjian antar negara selama dalam batas tidak melanggar aturan-aturan agama, maka pembuat kesepakatan tersebut wajib untuk menaatinya.³³

Selain itu, dalam *siyāsah dawliyah* mengatur mekanisme persengketaan antar negara. Dalam kondisi konflik, perang hanya boleh dilakukan jika tidak ada jalan menuju perdamaian. Perang tidak diperbolehkan jika tujuannya untuk memperluas wilayah, kekuasaan dan

³¹ Abd al-Qādir Awdah, *al-Islām wa Awdā'unā al-Siyāsah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1981), 170-179.

³²Khalāf, *al-Siyāsah al-Shar'ah*..., 61.

³³ Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 137-139.

Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa sumber kekayaan suatu negara dapat dihasilkan melalui pemasukan dari zakat, *ghanimah* dan *fai'*. *Fai'* dalam pandangan Ibn Taymiyah adalah kekayaan yang bersumber selain dari zakat dan *ghanimah*. Sedangkan pendistribusiannya harus mempertimbangkan unsur skala prioritas menurut tingkat kemaslahatan yang paling tinggi bagi rakyat, yang alokasinya diberikan dalam bentuk gaji, subsidi, pembangunan dan lainnya.³⁷

Berbeda dengan Ibn Taymiyah, al-Mawardi membahas mengenai *siyāsah māliyah* dengan mendetail. Menurut al-Mawardi, sumber pemasukan kekayaan negara bisa sangat beragam, baik yang bersifat normatif seperti zakat, *ghanimah* dan *fai'*, maupun yang bersifat ijtihadi, seperti *jiziyah*, *kharaj*, *ushr* dan lainnya.³⁸ Dalam hal oprasionalnya, al-Mawardi berpendapat bahwa seluruh kegiatan pemasukan dan pembelanjaan keuangan negara dilakukan dengan sistem pengadministrasian (*diwān*) yang ketat dalam hubungannya dengan

³⁷ Ibn Taymiyah, *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Iṣlāḥ al-Ra'ī wa al-Raiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 256.

- 1) Prinsip tauhid dan *isti'mar*, yakni pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia;
- 2) Prinsip distribusi rizki, yakni pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki Allah;
- 3) Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum, yakni pandangan bahwa harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah.

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam

⁴⁰ A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 287-288.

Menurut Al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, pemerataan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik, dan melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syariat.

Al-Baghdadi sebagai telah disebut di muka berpendapat pemerintahan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan. Pemerintahan itu, kata Rabi', melalui penguasanya bertugas untuk memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama.

Yang dimaksud dengan *imamah* (pemerintahan atau kepemimpinan), menurut Al-Mawardi, dijabat oleh khalifah atau pemimpin (*al-ra'is*), atau raja (*al-mulk*), atau penguasa (*al-sultān*), atau kepala Negara (*qaid al-daulat*), dan kepadanya ia berikan label agama.

urusan agama yang disyariatkan dan mengatur terwujudnya kemaslahatan umum.⁴²

C. Hak dan Kewajiban Imam

Menurut al-Mawardi, pengangkatan khalifah hukumnya wajib berdasarkan Syari'at, dan bukan berdasarkan akal. Sebab *khalifah* bertugas mengurus urusan-urusan agama, namun bisa jadi akal tidak mengkategorikan kepemimpinan (*imamah*) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan kepemimpinan (*imamah*) tersebut. Akal hanya menghendaki agar setiap orang dapat melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan bukan pemutusan hubungan, serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi. Namun syari'at menghendaki bahwa segala persoalan menyangkut kepemimpinan (*imamah*) harus diserahkan kepada aturan Allah swt. Karena kepala negara (*khalifah*) disiapkan sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan mengatur dunia.⁴³

Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai ‘Pengganti Rasul’, memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara. Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meliputi:⁴⁴

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang

⁴²J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 244.

⁴³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 2.

⁴⁴Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 24.

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kecuali tentunya jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat (yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara). Maka, dengan sendirinya seorang kepala negara mempunyai dua hak atas umat. Ibnu Taymiyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang Imam dengan mendasarkan pada al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yakni sebagai berikut:

Pasal 26⁴⁷

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

46

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.⁴⁹

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 28

dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada a
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara
dilanjutkan dengan pemberhentian.

- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30 ⁵²

- 1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

⁵² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI DESA TAMAN
KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO**

Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo merupakan salah satu desa terpencil di dataran tinggi kota Situbondo. Desa ini merupakan desa yang terletak pada belahan bukit bagian timur dalam Kecamatan Sumbermalang.

Secara Geografis desa Taman terletak di dataran tinggi dengan topografi bergelombang dengan lerengan 20-60, dan suhu rata-rata mencapai 15-28 derajat C dengan tinggi tempat dari permukaan laut mencapai 700 mdl. Dilihat dari luas wilayahnya Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo adalah 150,08 Ha. Batas-batas wilayahnya ialah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Desa Gebang Semambung Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo
- b. Sebelah selatan: Desa Alastengah Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo
- c. Sebelah Timur: Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo
- d. Sebelah Barat: Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

- ## 2. Pembagian Wilayah

- a. Dusun Andung berada di RW 2 RT 8 dengan jumlah KK 363, 928 Jiwa, 445 penduduk laki-laki dan 483 Penduduk Perempuan
- b. Dusun Krajan berada di RW 2 RT 7 dengan jumlah 425 KK, 1083 Jiwa, 558 Penduduk laki-laki dan 525 Penduduk Perempuan
- c. Dusun Taman berada di RW 2 RT 5 dengan jumlah 257 KK, 611 Jiwa, 292 Penduduk laki-laki dan 319 Penduduk Perempuan.

Jumlah penduduk desa di alami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan rendah kurang dari 2500 orang.⁵³ Desa TAMAN memiliki jumlah penduduk 2.314 pada tahun 2019 dengan jumlah kepala keluarga 921 KK. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 1.115 orang dan perempuan 1.119 orang.

4. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan baik pembangunan fisik maupun *nonfisik* sebagai objek dan subjek pembangunan.

Tabel 1. Berdasarkan usia

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0-12 bulan	89 orang	103 orang
1 tahun	46 orang	68 orang
2	56 orang	54 orang
3	56 orang	45 orang
4	39 orang	28 orang
5	53 orang	40 orang
6	51 orang	42 orang
7	52 orang	44 orang
8	40 orang	48 orang
9	32 orang	37 orang
10	51 orang	44 orang
11	32 orang	67 orang
12	30 orang	53 orang
13	65 orang	26 orang
39	44 orang	34 orang
40	37 orang	22 orang
41	56 orang	22 orang
42	24 orang	10 orang
43	29 orang	11 orang
44	30 orang	25 orang
45	30 orang	20 orang
46	33 orang	29 orang
47	40 orang	31 orang
48	42 orang	25 orang
49	31 orang	16 orang
50	12 orang	21 orang
51	16 orang	42 orang
52	23 orang	24 orang

Potensi sumber daya manusia di desa Taman tahun lalu jumlah laki-laki 1.115 orang dan perempuan 1.1119 orang dengan total keseluruhan yaitu 2.314 orang. Dengan perkembangannya, sumber daya manusia di desa Taman untuk mengembangkan potensi masyarakatnya dalam meningkatkan ekonomi juga ditunjang dengan pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3 Pendidikan

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0 orang	0 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	38 orang	42 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang Sekolah	205 orang	182 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	3 orang	2 orang
Tamat SD	0 orang	0 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	8 orang	5 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	0 orang	0 orang
Tamat SMP	20 orang	22 orang
Tamat SMA	222 orang	330 orang
Tamat D1	23 orang	21 orang
Tamat D2	21 orang	17 orang
Tamat D3	23 orang	18 orang
Tamat S1	44 orang	59 orang
Tamat S2	8 orang	5 orang
Tamat S3	0 orang	0 orang
Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Tamat SLB B	0 orang	0 orang
Tamat SLB C	0 orang	0 orang
Jumlah total	1087 orang	

Sumber: Potensi desa dan kelurahan tanjungsari

Masyarakat desa Taman pada dasarnya adalah suku Madura dan keseluruhan beragama islam.

Desa Taman memiliki sarana pendidikan yang terdiri dari 3 buah gedung playgroup, 3 buah gedung TK, 1 gedung MI, dan 2 gedung SD. Selain sarana pendidikan juga terdapat tempat beribadah yang terdiri dari 4 masjid dan 12 musholla. Kemudian untuk menunjang perekonomian masyarakat juga terdapat dari 3 selepan penggiling gabah dan 1 sarana kesehatan

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Muhammdad Sarji	Kepala desa	SD
2	Fathor	Sekretaris desa	SLTA
3	Dilli	Kaur Keuangan	SLTA
4	Ibnu Hajar	Kasi Pemerintahan	SLTA
5	Halili.	Kaur Perencanaan	SLTA
6	As'adi	Kasi Kesra	SLTA
7	Manijar	Kasi Pelayanan	SLTA
8	Mustajar	Kasun Krajan	SLTA
9	Bais	Kasun Andung	SLTP
10	Surokso	Kasun Taman	SLTA

1. Pengertian Pemerintahan Desa

dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar.⁵⁴

- a. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan

- f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektifitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
- i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan umum⁵⁷

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Pada Pasal 6 UU Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Desa, yaitu Pasal 6 Berbunyi:

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - 4) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- Menetapkan peraturan desa
- 4) Menetapkan APBDesa
- 5) Membina kehidupan masyarakatdesa
- 6) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakatdesa
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Wawancara diatas menjelaskan fungsi kepala desa hanya mampu melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak menentukan langkah-langkah apa yang mesti dikerjakan oleh masyarakat dan aparat desa. Sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian pada desa Taman kepala desa cukup mampu dalam merencanakan pembangunan desa, tetapi belum bisa transparansi dan merealisasikan pembangunan desa.

Kepala desa merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan dan pengarahannya aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Menurut Fathor selaku sekretaris desa mengatakan: Sebelum melaksanakan pembangunan desa kepala desa selalu memberikan pengarahan-pengarahan tentang apa yang akan dikerjakan terutama kepada

Menurut Suwito selaku kepala dusun mengatakan : Kepala desa tidak memimpin langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentu tidak bisa memberikan motivasi dan semangat gotong-royong terutama bagi masyarakat untuk selalu berkerjasama dengan aparat desa dan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.⁶³

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa Taman kepala desa tidak mampu dalam menggerakkan aparat desa dan masyarakat untuk selalu

⁶³Hasil Wawancara dengan Mustajar selaku Kepala Dusun Krajan Desa Taman Kcc. Sumbermalang Kabupaten Situbondo, pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB.

berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kepala desa kurang bisa mengendalikan masyarakat atau megajak masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan.

Kepala desa dituntut mampu dalam mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa serta tegas dengan keputusannya tersebut.

Menurut Saiful Haq, salah satu masyarakat desa mengatakan :
Keputusan yang diambil kepala desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan desa tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, usulan dan saran dari masyarakat dalam musyawarah desa, keputusan yang diambil ditetapkan oleh kepala desa itu sendiri tanpa sepengetahuan masyarakat desa Taman.⁶⁴

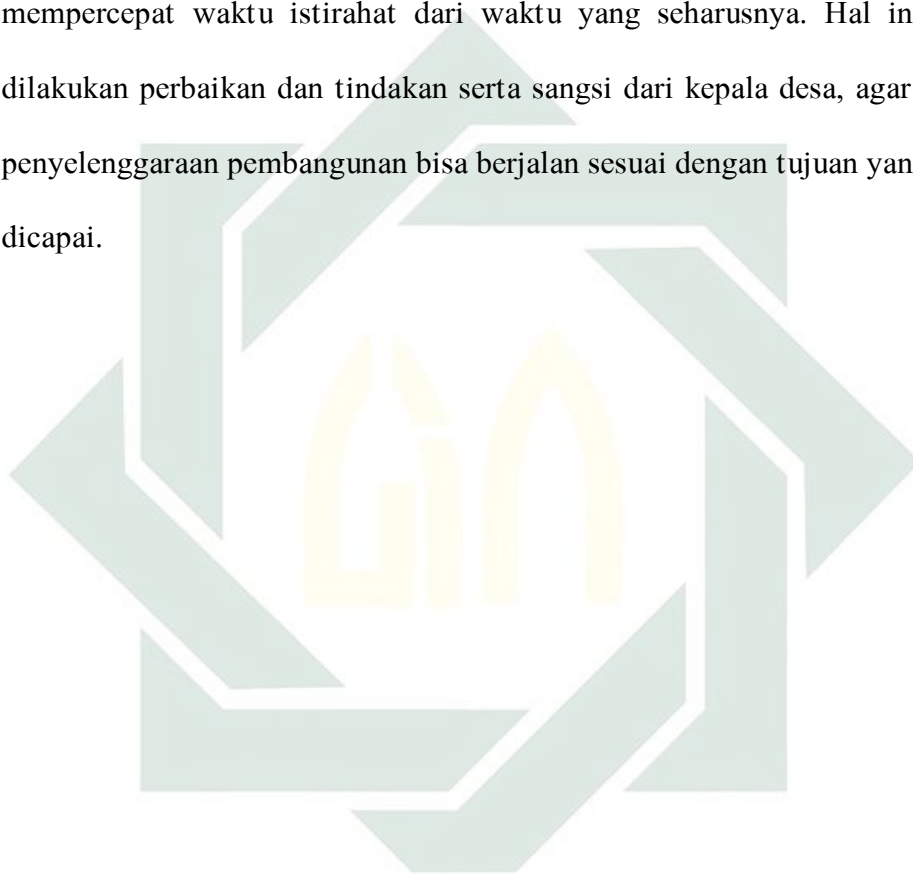
Kemampuan dalam mengambil keputusan merupakan kebijakan yang mesti diambil oleh kepala desa. Keputusan dan kebijakan kepala desa haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang dihasilkan melalui musyawarah desa. Sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan masyarakat merasa tersalurkan aspirasinya.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa Taman kepala desa tidak mampu dalam mengambil dan menyampaikan keputusan dalam proses

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Karman selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 08:30 WIB.

Menurut Suprpto, salah satu masyarakat desa mengatakan : Kepala desa dalam hal pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan jarang memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dan kepala desa kurang tanggap atau teliti dengan penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan dan tidak memberikan sangsi yang tegas terhadap masyarakat atau aparat desa yang melakukan penyimpangan.⁶⁶

sil Wawancara dengan Suprpto selaku Masyarakat Desa Taman Kec. Sumbermalang Kab. Bojonegara, pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 08.55 WIB.



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI DESA TAMAN
KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UU. NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa di dalam pelaksanaan peraturan desa, Kepala Desa memiliki tugas untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Selain itu juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Serta melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa. Pelaksanaan Peraturan Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dilakukan Kepala Desa di Desa Taman Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo sejauh ini belum menunjukkan kemajuan dalam hal segi pemenuhan kemakmuran masyarakat Desa Taman Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo. Dalam hal ini pemerintah Desa Taman telah merencanakan pembangunan fisik Desa berupa:

1. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui dari hasil peneltian adalah:

desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya terkadang saja hadir.

- b. Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.
4. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
 - a. Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
 - b. Kurang jelasnya pembagian tugas antara aparat desa dengan masyarakat desa.
5. Kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
 - a. Kurang keterbukaan atas informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa.
 - b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang kelokasi pembangunan.
 - c. Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.
 - d. Keterlambatan bahan material dikarenakan cuaca yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan.

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Hukum Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2.

Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-anfal ayat 27:

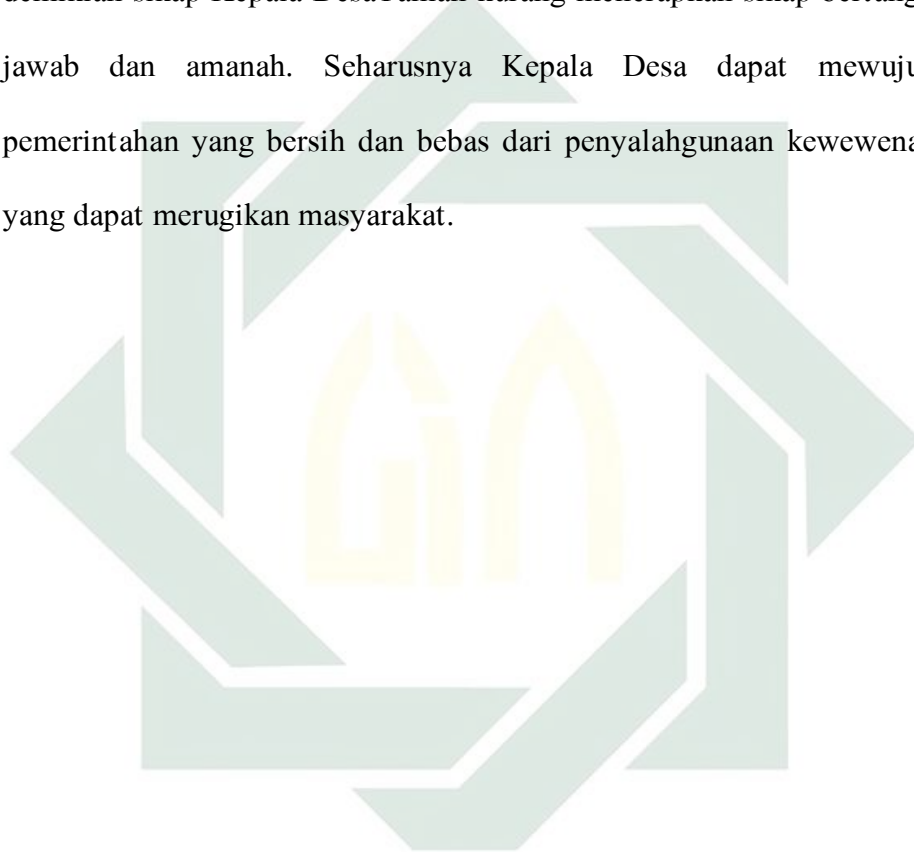
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَوْفُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخَوْفُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁶⁸

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur" an sehingga sepatutnya diteladani.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toba Putra Semarang, 1971), Qs. Al-Anfal ayat 27.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa hanya saja terdapat beberapa praktik yang belum maksimal yaitu dalam mengoordinasikan rancangan pembangunan dan penyampaian informasi tentang pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Bahwa dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa yang secara syariah sudah optimal hanya saja belum amanah dalam bertanggung jawab melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan dalam pembangunan desa.

B. Saran

Dari Kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diajukan:

1. Kepada Kepala Desa diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pembangun-pembangunan tidak hanya merencanakan tetapi juga harus diwujudkan. Kepala Desa diharapkan untuk ikutserta dan berperan aktif dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera.
2. Kepada Pemerintah Desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun oleh desanya.
3. Kepada Masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika Kepala Desa dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin, *Penngantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2004.
- Ayub, Moh . E., *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Jakarta, Gema Isnani Press, 1997.
- Danel, Studi Tentang Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebakung Kecamatan Batapayu Kabupaten Tana Tidung E-Journal Ilmu Pemerintahan, tt.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toba Putra Semarang, 1971.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, GramediaPustaka Utama, 2011.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2003.
- Sangaji, Etta Mamang, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasyimzoem, Yusrani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.

- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- HM. Sonhadji, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA JILID II JUZ 4-5-6*, Yogyakarta:Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- _____, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Pranadamedia Group, 2014.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Kaelan. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta, Pradigma, 2005.
- Lisa, Oktavia, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*”. Skripsi UIN Raden Intan, Program Studi *Siyasah Syar'iyah*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Lampung, 2018.
- Nabila, Puspita, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*”. Skripsi UIN Raden Intan, Program Studi *Siyasah Syar'iyah*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Lampung, 2018.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, tt.
- Pulungan J. Suyuthi ,*Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.

HM. Sonhadji, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA JILID II JUZ 4-5-6*,
Yogyakarta:Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990.

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.

_____, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Pranadamedia Group, 2014.

Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2010.

Kaelan. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta, Pradigma, 2005.

Lisa, Oktavia, “*Tinjauan Fiqh Siyasaah Dan Undang-Undang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*”. Skripsi UIN Raden Intan, Program Studi *Siyasaah Syar’iyyah*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Lampung, 2018.

Nabila, Puspita, “Tinjauan Fiqh Siyasa Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”. Skripsi UIN Raden Intan, Program Studi *Siyasa Syar’iyyah*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Lampung, 2018.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, tt.

Pulungan J. Suyuthi ,*Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2014.

Yahya, Ridwan, *Memilih pemimpin dalm Prespektif Islam*, Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004.

Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional,
Pasal 1 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1).

www.Berdesa.Com.

<https://indonesiana.tempo.com>.